



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERKAH JAMU MAKMUR LEMBAGA
KEUANGAN DESA (LKD)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD), serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, salah satu modal BUM Desa Bersama berasal dari penyertaan modal Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Persetujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Lembaran Desa Daleman Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA BERKAH JAMU MAKMUR LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD) TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih guna mengelola usaha dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa Bersama.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal berasaskan :
 - a. kepastian hukum; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Penyertaan Modal Desa bertujuan :
 - a. meningkatkan Pelayanan Masyarakat;
 - b. penguatan BUM Desa Bersama;
 - c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
 - d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Daleman diberikan kepada BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD)

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) dari Pemerintah Desa berasal dari APB Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk modal usaha BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD)

BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Bagi hasil dan keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) merupakan pendapatan asli Desa yang dimasukkan dalam APB Desa setiap tahun.
- (2) Besaran bagi hasil dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 24 Oktober 2023
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2023 NOMOR 3

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DALEMAN,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 144 / 04 / BPD / X / 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh bulan oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa Tahun 2023 , Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun 2023, Desa Daleman, Kecamatan Daleman, Kabupaten Sukoharjo, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman, 20 Oktober 2023

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
KETUA

ttd

ttd

SUDARMAN

RADINO, BcHk

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD Desa
Daleman
Nomor : 144/04/BPD/X/2023
Tanggal : 20 Oktober 2023

DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Jum'at, 20 Oktober 2023
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal
Rapat Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama
Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun
2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RADINO, Bc.Hk	Ketua	1.
2.	H DARMADI S.Ag	Wakil Ketua	2.
3.	SUTRISNO S.Pd M.Si	Sekretaris	3.
4.	Hj SRI MULYANI	Bidang Pemerintahan	4.
5.	BUDI SUDARSONO, SP	Bidang Pembangunan	5.
6.	AGUNG SUROSO	Anggota	6.
7.	GIYARTO	Anggota	7.
8.	JOKO LISTIYONO	Anggota	8.
9.	MUJIYONO	Anggota	9.

BPD DESA DALEMAN
Ketua,

ttd

RADINO, Bc.Hk

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD Desa
Daleman
Nomor : 144/04/BPD/X/2023
Tanggal : 20 Oktober 2023

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Jum'at, 20 Oktober 2023
Jam : 19.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur
Rapat Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun 2023, Desa Daleman, Kecamatan
Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMAN	Kepala Desa	1.
2.	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	2.
3.	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	3.
4.	KUSNAN ASHURI	Kasi Kesejahteraan	4.
5.	SRI KAYATI	Kasi Pelayanan	5.
6.	GALIH RADITYA AJI, S.Sn	Kaur Tata Usaha dan Umum	6.
7.	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	7.
8.	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	8.
9.	AGUS SETYO NUGROHO	Kepala Dusun I	9.
10	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	10.
11	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	11.

BPD DESA DALEMAN
Ketua,

ttd

RADINO, Bc.Hk



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
DENGAN
KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 144 / 04 / BPD / X / 2023

NOMOR : 144 / 39 / X / 2023

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
BERKAH JAMU MAKMUR LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)
TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Daleman
2. Nama : SUDARMAN
Jabatan : Kepala Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama Berkah Jamu Makmur Lembaga Keuangan Desa (LKD) Tahun 2023, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
Ketua,

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER

ttd
RADINO, BcHk

ttd
SUDARMAN